



## Artikel Penelitian

**History:**

Received: 10 Juli 2023  
Revised: 06 Agustus 2023  
Accepted: 09 Agustus 2023

**Kata Kunci:**

Kondisi Keuangan Daerah;  
Pemerintah Daerah

**Keywords:**

Regional Financial Condition;  
Local Government

**INDEXED IN**

SINTA - Science and  
Technology Index  
Crossref  
Google Scholar  
Garba Rujukan Digital: Garuda

**CORRESPONDING  
AUTHOR**

Arsynata Dewi S. Kanoli  
Universitas Abdul Azis  
Lamadjido Panca Bhakti Palu

**EMAIL**

[arsynatadewi16@gmail.com](mailto:arsynatadewi16@gmail.com)

**OPEN ACCESS**

E ISSN 2623-2022

**Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten  
Buol Tahun 2019-2021***Analysis of the Financial Condition of the Buol District  
Government for 2019-2021***Arsynata Dewi S. Kanoli<sup>1\*</sup>, Syamsul<sup>2</sup>, Siti Zuhroh<sup>3</sup>**<sup>1-3</sup>Universitas Abdul Azis Lamadjido Panca Bhakti Palu

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah kabupaten buol tahun 2019-2021 yang diukur dengan 6 dimensi yaitu solvabilitas jangka pendek, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan dan solvabilitas layanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan dokumen sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Buol selama tiga tahun (2019 s.d 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten buol memiliki solvabilitas jangka pendek, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, dan fleksibilitas keuangan yang baik karena memiliki aset lancar, aset, jumlah pendapatan, dan kapasitas pendapatan yang dinilai cukup memadai, namun memiliki kemandirian keuangan yang masuk dalam kategori sedang karena masih bergantung pada sumber pendanaan di luar kendalinya dan juga memiliki solvabilitas layanan yang menunjukkan cukup baik dalam menyediakan layanan publik kepada masyarakatnya.

**Abstract:** This study aims to determine the financial condition of the Buol district government for 2019-2021 as measured by 6 dimensions, namely short-term solvency, budget solvency, long-term solvency, financial independence, financial flexibility and service solvency. This research uses a qualitative descriptive method and uses secondary documents in the form of Local Government Financial Reports (LKPD) in Buol Regency for three years (2019 to 2021). The results of the study show that the local government of Buol Regency has good short-term solvency, budget solvency, long-term solvency, and financial flexibility because it has current assets, assets, total income, and income capacity which are considered sufficient, but has financial independence which is included in the medium category because it still depends on funding sources beyond its control and also has service solvency that shows quite well in providing public services to its people.

**Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)**

Pages: 1009-1017

Doi: 10.56338/jks.v6i8.3993

## LATAR BELAKANG

Keuangan daerah adalah uang rakyat yang berasal dari rakyat dan digunakan untuk rakyat. Pengelolaan keuangan daerah yang baik penting dilakukan agar uang daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk pembangunan. Bentuk pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah dengan memberikan keseimbangan pada pengelolaan keuangan daerah.

Dalam bidang keuangan daerah, fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam struktur APBD. Idealnya, PAD menjadi sumber pendapatan pokok daerah, karena sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung diluar kontrol atau kewenangan daerah (Suryani, 2016).

Menurut Maizunat (2017), alokasi Dana Perimbangan tidak jarang menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah daerah. Padahal, otonomi memberikan peluang yang luas bagi pemerintah daerah untuk menggali kemungkinan sumber pendanaan baru, yang diharapkan pada akhirnya menjadi pemerintah daerah yang mandiri secara berkelanjutan. Ketergantungan pada dana perimbangan ini membuat pemerintah daerah secara tidak sadar menjadi lembaga yang kurang inovatif dan kurang menyadari situasi keuangannya, percaya dan merasa “aman” bahwa pendanaannya akan diselenggarakan secara teratur. Pemantauan kesehatan keuangan kemudian menjadi sesuatu yang tidak diprioritaskan oleh pemerintah negara bagian.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari ringkasan APBD kabupaten Buol, sepanjang Tahun Anggaran 2019-2021 pendapatan daerah Kabupaten Buol menunjukkan penurunan yang sangat signifikan, yaitu dari Rp1.029 Triliun lebih pada Tahun 2019, menjadi 908 Milyar lebih pada Tahun 2021. Di antara ketiga kelompok pendapatan, terlihat bahwa Pendapatan transfer mengalami penurunan yang paling tinggi, kemudian Lain-lain Penerimaan Daerah yang Sah, dan terakhir adalah Pendapatan Asli Daerah.

Maher dan Nollenberger (2009) mendefinisikan kondisi keuangan sebagai kemampuan organisasi untuk mempertahankan tingkat layanan, menahan gangguan keuangan, dan menanggapi permintaan yang naik dan turun. Groves dkk. (1981) dan Nollenberger et al. (2003) mendefinisikan situasi keuangan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk: menghasilkan uang untuk memenuhi kewajiban (solvabilitas kas); Menghasilkan pendapatan untuk menutup pengeluaran agar tidak terjadi defisit (solvabilitas anggaran); menutupi semua biaya, termasuk kewajiban yang harus dibayar pada tahun berjalan dan yang akan datang (solvabilitas jangka panjang); dan menyediakan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat (solvabilitas layanan).

Penelitian ini dilakukan menggunakan acuan yang dilakukan oleh Ritonga (2014) mengenai menilai kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Studi ini adalah yang pertama dalam mengusulkan konsep untuk menilai kondisi keuangan pemerintah daerah. Konsep ini terdiri dari enam dimensi, yaitu solvabilitas jangka pendek, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, fleksibilitas keuangan, kemandirian finansial, dan solvabilitas tingkat layanan. Yang kemudian membuat peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap kondisi keuangan pemerintah di Kabupaten Buol. Pemantauan terhadap kesehatan keuangan secara berkala harus dilakukan agar pemerintah daerah memiliki sistem peringatan dini terhadap berbagai peluang ke depan baik dari perspektif ekonomi makro maupun sosial politik (Maizunati, 2017).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buol tahun 2019-2021 setelah diukur dengan 6 dimensi yaitu solvabilitas jangka pendek, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan dan solvabilitas layanan.

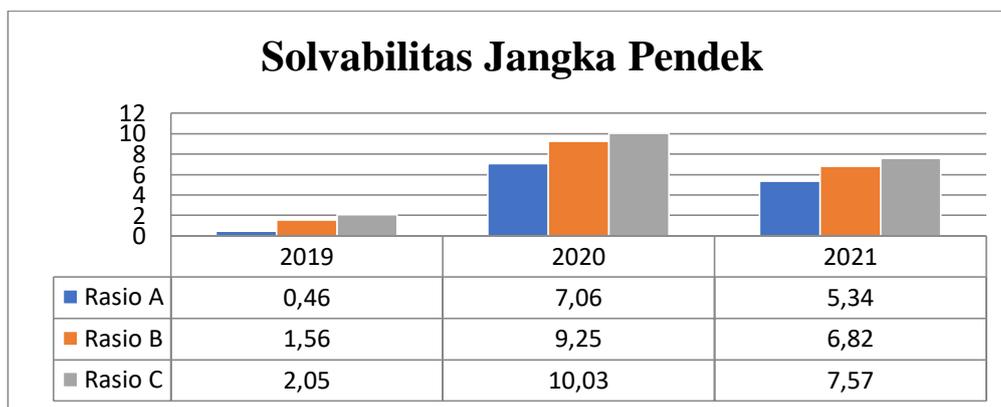
## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan dokumen sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten Buol selama tiga tahun (2019 s.d. 2021). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisa deskriptif,

yaitu metode penganalisaan data dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian mengklasifikasikan, menganalisis, dan selanjutnya menginterpretasikannya sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti.

## HASIL DAN DISKUSI

**Solvabilitas jangka Pendek.** Dari hasil penelitian selama kurun waktu tahun 2019 s.d 2021 Solvabilitas jangka pendek kabupaten buol berfluktuasi. peningkatan nilai rasio dimensi solvabilitas jangka pendek di Kabupaten Buol terjadi pada tahun 2020 disebabkan oleh rendahnya nilai kewajiban lancar yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Buol pada saat itu, sehingga hal ini menyebabkan nilai aset lancar yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Buol lebih banyak dibandingkan dengan nilai kewajiban lancar. Selanjutnya, terjadi pula kenaikan pada nilai realisasi kas dan setara kas pada tahun tersebut. Solvabilitas jangka pendek pula menunjukkan tren menurun yang cukup signifikan pada Rasio A sebesar 7,06 di tahun 2020 turun menjadi 5,34 di tahun 2021. Kondisi yang sama juga diikuti oleh Rasio B dan Rasio C. tren menurun tersebut pada tahun 2021 di sebabkan kenaikan hutang jangka panjang sehingga mengakibatkan nilai solvabilitas jangka pendek Kabupaten Buol pada tahun 2021 menurun. Adapun tabel dari hasil perhitungan rasio solvabilitas jangka pendek sebagai berikut:



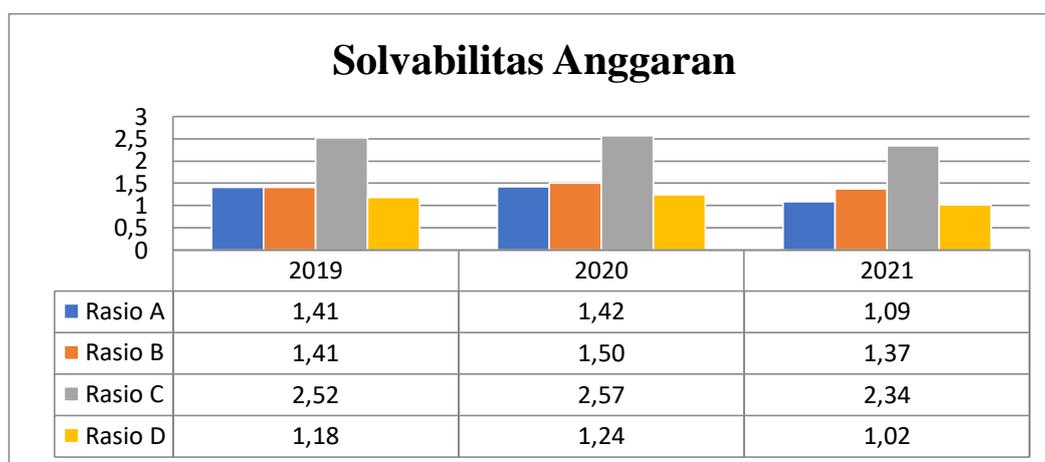
**Gambar 1.** Grafik Hasil Perhitungan Dimensi Solvabilitas Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Buol

Dapat dikatakan bahwa nilai rasio solvabilitas jangka pendek yang semakin menurun tersebut menandakan bahwa jumlah kas yang menganggur semakin sedikit, namun sebaliknya kenaikan nilai rasio solvabilitas jangka pendek menandakan bahwa semakin banyak pula jumlah dana menganggur. Kemudian, berdasarkan data yang didapatkan maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2019 hingga tahun 2021 pemerintah daerah Kabupaten Buol tidak melakukan aktivitas investasi jangka pendek. Sehingga, sumber aset lancar yang dapat diandalkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buol untuk mengatasi kewajibannya berasal dari kas dan setara kas dan juga piutang yang dimilikinya.

Namun demikian, besaran rasio ini masih menunjukkan angka yang cukup wajar. Dalam arti pemerintah daerah masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam penelitian Cipto Priyono bahwa konteks manajemen kas, penurunan rasio solvabilitas mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan perbaikan terhadap pengelolaan aset lancarnya. Yakni aset

lancar yang mengganggu telah dioptimalkan penggunaannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan.

**Solvabilitas Anggaran.** Dari hasil penelitian selama kurun waktu tahun 2019 s.d 2021 Solvabilitas Anggaran Kabupaten Buol berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Peningkatan nilai rasio A, B, C dan D terjadi pada tahun 2020 dengan masing-masing nilai 1,42, 1,50, 2,57 dan 1,24 disebabkan oleh kenaikan nilai realisasi pendapatan pada LRA dan menurunnya nilai pengeluaran pemerintah daerah. Namun tahun 2021, nilai rasio solvabilitas anggaran mengalami penurunan disebabkan karena nilai realisasi dari pendapatan pada pemerintahan Kabupaten Buol semakin menurun dan Pengeluaran pada daerah semakin naik. Penurunan pada tahun 2021 juga disebabkan karena pertumbuhan pendapatan DAK dan belanja yang lebih besar dari pertumbuhan pendapatan. Adapun grafik dari hasil perhitungan rasio solvabilitas anggaran sebagai berikut:



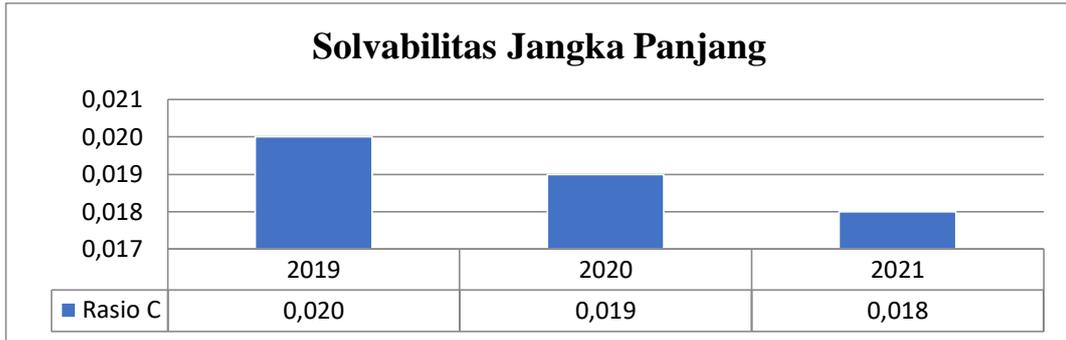
**Gambar 2.** Grafik Hasil Perhitungan Dimensi Solvabilitas Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buol

Dalam hal ini nilai rasio menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Buol mengalami kesulitan untuk mendanai kegiatan operasionalnya, karena memiliki jumlah pendapatan yang kurang untuk membiayai kegiatan operasionalnya pada tahun 2021. Walaupun nilai solvabilitas anggaran pada pemerintah daerah Kabupaten Buol berfluktuasi, tetapi nilai rasio ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki jumlah pendapatan yang cukup untuk membiayai kegiatan operasionalnya karena tidak ada nilai rasio yang di bawah nilai 1. Menurut (Priyono, 2017) sebuah pemerintahan daerah akan mengalami kesulitan untuk mendanai kegiatan operasionalnya apabila nilai rasio solvabilitas anggarannya berada di bawah 1. (Maizunati, 2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penurunan nilai rasio solvabilitas anggaran dapat disebabkan oleh lebih besarnya pertumbuhan pendapatan DAK dan belanja operasional dibandingkan pertumbuhan pendapatan. Menurut (Priyono, 2017) total belanja yang terus naik namun tidak disertai dengan naiknya pendapatan akan menyebabkan nilai anggaran pemerintah daerah melemah.

Dapat dikatakan bahwa Semakin tinggi rasio semakin baik adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memiliki pendapatan yang cukup untuk menutupi pengeluaran operasional. Meskipun besaran rasio tersebut menunjukkan pemerintah daerah masih mampu mendanai belanjanya, namun kondisi ini perlu mendapat perhatian lebih. Tidak menutup kemungkinan, menurunnya kemampuan pendapatan untuk mendanai operasional pemda anak berujung pada masalah yang lebih serius. Hal ini dikarenakan defisit operasi merupakan awal terjadinya kesulitan keuangan di masa depan (Kloha dkk., 2005).

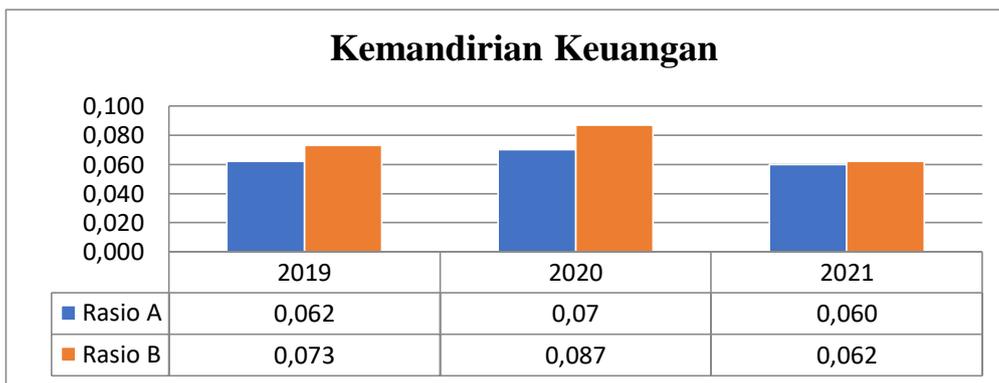
**Solvabilitas Jangka Panjang.** Dari hasil penelitian selama kurun waktu tahun 2019 s.d 2021 Solvabilitas jangka pendek kabupaten buol berfluktuasi. Dimensi solvabilitas jangka panjang rasio A dan rasio B kabupaten buol tidak dapat dihitung karena kabupaten buol tidak memiliki kewajiban jangka panjang selama tahun 2019-2021. Dari rasio tersebut menyatakan bahwa Kabupaten Buol mengalami peningkatan nilai rasio yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 0,020 disebabkan total

asset yang menurun dalam membiayai sumber daya sendiri. Nilai yang lebih rendah dari rasio ini terjadi pada tahun 2021 dengan nilai 0,018, menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya cukup rendah. Sebaliknya, nilai yang lebih tinggi dari rasio ini menunjukkan kemampuan yang lebih tinggi dari pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Buol secara umum memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Adapun grafik dari hasil perhitungan rasio solvabilitas jangka panjang sebagai berikut:



Gambar 3. Grafik Hasil Perhitungan Dimensi Solvabilitas Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Buol

**Kemandirian Keuangan.** Dari hasil penelitian selama kurun waktu tahun 2019 s.d 2021 nilai kemandirian keuangan Kabupaten Buol berfluktuasi, Peningkatan nilai rasio kemandirian keuangan pada tahun 2020 yang cukup tinggi dibandingkan atas peningkatan nilai rasio tahun-tahun lainnya disebabkan karena adanya kenaikan yang cukup tinggi pada nilai realisasi penerimaan PAD pada pemerintahan daerah Kabupaten Buol. Selanjutnya, Penurunan pada nilai kemandirian keuangan tahun 2021 yang disebabkan nilai realisasi penerimaan PAD menurun dan belanja daerah meningkat. Nilai rasio pada dimensi kemandirian keuangan yang berfluktuasi ini disebabkan karena pada tahun 2019 hingga tahun 2021 nilai realisasi pada pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buol masih berfluktuasi. Adapun grafik dari hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan sebagai berikut:



Gambar 4. Grafik Hasil Perhitungan Dimensi Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol

Menurut (Priyono, 2017) rendahnya rasio kemandirian ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Buol masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi atas dana transfer dan dana perimbangan. Semakin rendah nilai rasio ini menunjukkan semakin sedikit kemandirian keuangan dari kondisi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buol. Namun demikian, semakin besar nilai kedua rasionya, semakin besar pula kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai aktivitas pemerintah daerah, dengan demikian semakin besar nilai rasio, maka semakin baik kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buol.

**Fleksibilitas Keuangan.** Dari hasil penelitian pada dimensi ini, deskripsi rasio dimensi fleksibilitas keuangan hanya berdasarkan perhitungan rasio A, rasio B dan Rasio D karena ketiadaan kewajiban jangka panjang Kabupaten Buol. Adapun grafik dari hasil perhitungan rasio solvabilitas layanan sebagai berikut:



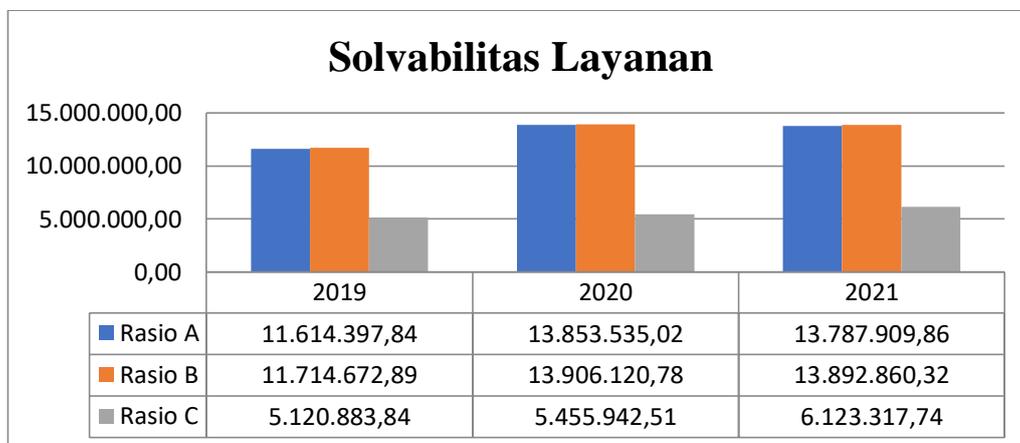
**Gambar 5.** Grafik Hasil Perhitungan Dimensi Fleksibilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol

Rasio A menunjukkan tren naik pada tahun 2021 karena Kabupaten Buol melakukan aktivitas investasi jangka panjang non permanen sehingga pada laporan keuangan bagian neraca menampilkan bagan akun pembayaran pokok pinjaman (Dana Bergulir), sedangkan Rasio B dan rasio D cenderung naik pada tahun 2020 yang disebabkan karena nilai realisasi total kewajiban pada pemerintahan Kabupaten Buol mengalami penurunan lebih dari dua kali lipatnya dibandingkan dengan realisasi total kewajiban pada tahun sebelumnya. Namun cenderung turun pada tahun 2021. Menurut Maizunati, 2017 penurunan nilai fleksibilitas keuangan ini dapat disebabkan karena kenaikan pertumbuhan persentase kewajiban dan pendapatan DAK yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan persentase total pendapatan.

Untuk kembali meningkatkan fleksibilitas keuangan, Pemerintah Kabupaten Buol perlu memperhatikan keseimbangan kenaikan DAK dan Belanja Pegawai dengan pertumbuhan Pendapatan sehingga tetap diperoleh rasio positif yang signifikan. Menurut (Ritonga, 2014) kemampuan pemerintah daerah untuk mengatasi kejadian luar biasa ditunjukkan oleh nilai rasio fleksibilitas keuangan. Semakin tinggi nilai rasio maka, semakin baik pula fleksibilitas keuangan yang dapat berasal dari pihak eksternal maupun pihak internal dari organisasi pemerintah daerah. Menurut (Priyono, 2017) pemerintah daerah yang mendapatkan nilai dibawah 1 dalam fleksibilitas keuangannya maka pemerintah daerah tersebut memiliki kualitas fleksibilitas keuangan yang tidak memadai. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan

bahwa pemerintah daerah Kabupaten Buol memiliki fleksibilitas keuangan yang baik, karena mempunyai tingkat kapasitas pendapatan yang lebih besar dibandingkan kapasitas utang.

**Solvabilitas Layanan.** Dari hasil penelitian selama kurun waktu tahun 2019 s.d 2021 nilai kemandirian keuangan Kabupaten Buol berfluktuasi, Nilai rasio solvabilitas layanan yang berfluktuasi ini menunjukkan nilai tren meningkat pada rasio A,B dari tahun 2019 s.d 2020, kemudian menurun di tahun selanjutnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Buol tahun 2019-2020 mampu menyediakan layanan publik ke masyarakatnya karena memiliki jumlah aset dan ekuitas yang tinggi. Namun, cenderung menurun tahun berikutnya karena jumlah penduduk meningkat. Kemudian rasio C fluktuatif, tapi cenderung naik di tahun 2021 hal ini menunjukkan semakin tinggi inefisiensi dalam memberikan layanan yang dapat mengancam solvabilitas tingkat layanan pemerintah daerah kabupaten Buol dan juga disebabkan jumlah penduduk kabupaten buol terus bertambah dan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk melayani setiap penduduk cukup meningkat. Adapun grafik dari hasil perhitungan rasio solvabilitas layanan sebagai berikut:



**Grafik 6.** Grafik Hasil Perhitungan Dimensi Solvabilitas Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol

Dari perhitungan pada dimensi solvabilitas layanan pemerintah kabupaten buol menunjukkan peningkatan komitmen yang cukup baik dari pemangku pemerintahan untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat baik dalam kuantitas maupun pemenuhan standar pelayanan di tahun 2019 hingga 2020 namun menunjukkan nilai penurunan pada tahun 2021.

Menurut (Maizunati, 2017) nilai rasio dimensi solvabilitas layanan bergantung pada perkembangan harga dan jumlah penduduk di suatu daerah. Pemerintah daerah perlu menjaga kestabilan dari pertumbuhan penduduk dan inflasi untuk menjaga agar nilai rasio solvabilitas layanan ini tetap tumbuh positif. Menurut (Suarjuwono & Ritonga, 2017) untuk solvabilitas layanan ini tidak bisa ditentukan apakah kondisi solvabilitas layanan suatu daerah dalam keadaan yang baik atau tidak, karena tidak ada batasan yang membedakan antara kondisi solvabilitas layanan yang baik ataupun yang kurang baik. Namun, pada umumnya semakin baik pelayanan yang diberikan ditunjukkan dengan semakin tinggi pula nilai rasio solvabilitas layanannya.

Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kondisi keuangan berdasarkan model enam dimensi Ritonga (2014). Setelah melalui proses analisis didapati bahwa pemerintah daerah kabupaten buol yang meskipun laporan keuangannya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Kantor Perwakilan BPK Republik Indonesia Sulawesi Tengah, namun

berdasarkan hasil analisis dengan model enam dimensi ritonga (2014) kondisi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buol masih termasuk dalam kategori cukup baik yang di ukur dari model enam dimensi yaitu solvabilitas jangka pendek, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan dan solvabilitas layanan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Buol memiliki solvabilitas jangka pendek yang cukup baik, karena memiliki aset lancar yang cukup untuk menjam in kewajiban lancarnya. Kemudian, pemerintah daerah Kabupaten Buol memiliki solvabilitas jangka panjang yang cukup baik karena memiliki jumlah aset yang cukup untuk menjamin kewajiban jangka panjangnya. Kemudian, pemerintah daerah Kabupaten Buol memiliki solvabilitas anggaran yang cukup baik, karena pemerintah Kabupaten Buol memiliki pendapatan yang baik untuk digunakan dalam membiayai belanja operasional. Kemudian, pemerintah daerah Kabupaten Buol memiliki kemandirian keuangan yang masuk dalam kategori sedang, karena masih bergantung pada sumber pendanaan di luar kendali. Kemudian, pemerintah daerah Kabupaten Buol memiliki fleksibilitas keuangan yang baik, karena memiliki jumlah kapasitas pendapatan (setelah dikurangi belanja-belanja wajib dan pendapatan terikat) yang lebih besar dibandingkan kapasitas utang. Kemudian, tidak dapat dikatakan apakah nilai rasio solvabilitas layanan pemerintah daerah Kabupaten Buol sudah dalam kadar baik ataukah belum. Hal ini dikarenakan, belum adanya batasan jelas yang dapat membedakan kondisi solvabilitas layanan yang baik dan kurang baik. Akan tetapi, semakin besar nilai solvabilitas layanan maka semakin baik pula kondisi solvabilitas layanan di pemma tersebut.

## KETERBATASAN PENELITIAN

Sulit mendapatkan data akurat sehingga data yang diperoleh hanya berdasarkan data yang analisis. Dan penelitian ini dilakukan hanya berdasarkan klusterisasi sederhana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buol.  
Adiya Mahendra, Faridah, anggerainiOktarida. 2022. Analisis RasioKondisi KeuanganPemerintah Daerah Di Kota Palembang Pada Tahun 2016-2020. Jurnal Syntax Admiration. Volume 3 No. 8 (2022).
- Ardiyana Primawaty. 2017. Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Se-Sumatera Tahun 2011-2015. Jurnal Sistem Informasi Akuntansi dan Bisnis. Volume 5 No. 1 (2017).
- Badan Pusat Statistik Kabuoaten Buol Melalui Website : <https://buolkab.bps.go.id>
- Cipto Priyono. 2018. Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Di Kalimantan Tahun 2011 S.d 2015. Jurnal Sistem Informasi Akuntansi dan Bisnis. Volume 6 No. 1 (2018).
- Firsty Himawan Kusnadi, dan Irwan Taufiq Ritonga. 2017. Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jurnal Sistem Informasi Akuntansi dan Bisnis. Volume 5 No. 1 (2017).
- Irna Mardi Yati, Jhon Andra Asmara. Analisis Indeks Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun 2015-2017. Jurnal Ilmiah Mahasiswa ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol 5, No. 2 (2020). 297-306.
- Ika Kurnia Indriani, Melati Pramudita Lestari, dan Merry Triani. 2020. Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Di Kalimantan. Jurnal Akuntansi. Volume 4 No. 2. Oktober 2020.
- Nur Afyah Maizunati. 2017. Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Dalam Klaster Kota Di Jawa-Bali. Jurnal Riset Akuntansi Keuangan. Volume 2 No.2. April 2017.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Putri Kemala Dewi Lubis. 2017. Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal Kitabah*. Volume 1 No. 1. Januari - Juni 2017.
- Ritonga, I. T. (2014). Developing A Measure Of Local Government's Financial Condition. *Journal of Indonesia Economy and Business*, 29(2), 142–164.
- Ritonga, I. T. (2012). Assessing financial condition of local government in indonesia: an exploration. *Public and Municipal Finance*, 27(2).
- Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit ALFABETA, CV. Bandung
- Suryani, Hasan Basri, dan Faisal. 2016. Analisis Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh Dan Di Sumatera Utara. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. ISSN : 1412-3126. Vol. 23, No. 1, Maret 2016, Hal. 63-71.
- Sukeksi Hastaningrum, dan Irwan Taufiq Ritonga. 2016. Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa Tahun 2011-2015. *Jurnal Accounting And Business Information systems Journal*. ISSN : 2302-1500 (online). Vol. 4 No. 4.
- Sofyan, M. (2019). Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan. *Akademika*, 17(2), 115–12
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai kepulauan.
- Wardhani, N. W. (2017). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Di Bali, Ntb, Dan Ntt Tahun 2011-2015. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(4).
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 14(1), 56–64.